

RENCANA KERJA TAHUN 2025



DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita ucapkan kehadirat ALLAH SWT yang telah memberikan rahmat dan Karunia-Nya kepada dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2025. Renja ini disusun sebagai gambaran perencanaan periode satu tahunan yang sesuai tujuan, sasaran, dan strategi pencapaian tujuan melalui kebijakan, program dan kegiatan.

Rencana kerja ini menguraikan rencana alokasi penggunaan anggaran Tahun Anggaran 2025, review pelaksanaan program dan kegiatan serta perencanaan prakiraan maju pada Tahun 2026. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Padang Lawas Utara yang merupakan salah satu perwujudan dalam praktik pemerintahan yang baik dengan disajikan secara subjektif tentang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam rangka pencapaian sasaran yang akan ditetapkan.

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Padang Lawas Utara tahun 2025 ini tentunya masih banyak terdapat kelemahan dan kekurangan sehingga kami sangat berharap untuk mendapatkan saran dan kritik yang konstruktif dari berbagai pihak untuk kesempurnaan rencana kerja ini. Rencana Kerja ini juga diharapkan dapat digunakan sebagai masukan dan acuan untuk penyempurnaan penyusunan Rancangan Akhir Kegiatan Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2025 serta untuk peningkatan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada masa mendatang.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada keluarga besar Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Padang Lawas Utara dan pihak-pihak yang telah memberikan dukungan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun 2025 ini, semoga dapat bermanfaat dan dapat dipergunakan seperlunya, terima kasih.

Gunung Tua, 19 Juli 2025

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA**



**YUSUF MD, HASIBUAN, MAP
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 197709141997031001**

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	4
1.3 Maksud dan Tujuan.....	7
1.4 Sistematika Penulisan.....	8
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU.....	8
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu Dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	9
2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	13
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	31
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RPD	32
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	35
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....	25
3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional	36
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja.....	36
3.3 Program dan Kegiatan.....	39
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	69
BAB IV PENUTUP.....	72

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Perencanaan menduduki peran yang sangat penting dalam pencapaian visi dan misi daerah dalam pembangunan suatu wilayah agar kesejahteraan masyarakat dapat tercapai. Perencanaan merupakan suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Perencanaan juga merupakan suatu proses yang berkesinambungan yang mencakup keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan alternatif penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu pada masa yang akan datang. Untuk mencapai proses tersebut, maka keterkaitan suatu dokumen perencanaan dengan dokumen perencanaan lainnya sangat erat dan menentukan.

Seluruh dokumen pembangunan daerah merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan satu dengan yang lain. Rencana Pembangunan Daerah adalah dokumen yang menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan yang merupakan penjabaran rencana strategis Pemerintah Daerah. Sebagai bahan masukan penyusunan rancangan awal Rencana Pembangunan Daerah adalah Rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah. Selanjutnya setelah Rencana Pembangunan Daerah disahkan maka menjadi acuan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah. Rencana **Renja PMD 2025**

Pembangunan Daerah dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Rencana Kerja Pemerintah Daerah digunakan sebagai pedoman/acuan dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Berkaitan dengan itu, maka Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun berjalan. Dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menyusun Rencana Kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Rencana Kerja merupakan penjabaran dari RPD dan dalam penyusunannya mengacu pada Rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Rencana Kerja sebagai bahan masukan untuk penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah. Yang selanjutnya menjadi acuan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah. Rencana Kerja juga mengakomodir hasil musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan, forum Satuan Kerja Pemerintah Daerah, pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan kebijakan pemerintah pusat.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Padang Lawas Utara yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 03 Tahun 2012 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 09 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara, menyusun Rencana Kerja (Renja) yang berfungsi sebagai acuan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi OPD dalam membangun daerah dengan menerjemahkan, mengoperasionalkan ke dalam program dan kegiatan OPD serta didalamnya memuat sasaran-sasaran pokok yang harus dicapai, arah kebijakan, program-program pembangunan dan kegiatan pokok pembangunan dalam 1 (satu) tahun.

Prinsip-prinsip di dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah, adalah sebagai berikut :

Renja PMD 2025

1. Berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah dan mengacu pada RPD;
2. Rumusan program/kegiatan di dalam Renja Perangkat Daerah didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif masing-masing Perangkat Daerah;
3. Penyusunan Renja Perangkat Daerah bukan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD;
4. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur dan target capaian kinerja, keluaran, biaya satuan per keluaran, total kebutuhan dana, baik untuk tahun n dan tahun n+1.

1.2 Landasan Hukum

Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2025 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas Utara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 103, Tambahan Lembaran Undang-undang Nomor 37 Tahun 2007 tentang Negara Republik Indonesia Nomor 4753);
5. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas Utara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 103, Tambahan Lembaran Undang-undang Nomor 37 Tahun 2007 tentang Negara Republik Indonesia Nomor 4753);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.1317 Tahun 2023 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifika,

Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

10. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor : 03 Tahun 2012 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 09 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor : 4 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2000 – 2035 Kabupaten Padang Lawas Utara;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara ;
14. Peraturan Bupati Padang Lawas Utara Nomor 33 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Organisasi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Padang Lawas Utara
- ~~15. Peraturan Bupati Padang Lawas Utara No 27 Tahun 2024 tentang Renja Perangkat Dearah tahun 2025~~
16. Peraturan Bupati Padang Lawas Utara No.25 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Dearah Kabupaten Padang Lawas Utara tahun 2025

1.3 Maksud dan Tujuan

a) Maksud

Maksud penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2024 adalah untuk,

- a. Memberikan arah dan pedoman bagi sekretariat, bidang maupun sub bagian dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sehingga tujuan dan sasaran yang ditetapkan dapat tercapai.
- b. Mempermudah koordinasi pelaksanaan dan pengendalian kegiatan yang dilakukan melalui monitoring dan evaluasi baik secara internal maupun eksternal.

b) Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2025 bertujuan untuk :

1. Mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, sehingga dapat mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang optimal.
2. Mendeskripsikan tentang program-program prioritas yang akan dilaksanakan langsung oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Padang Lawas Utara.
3. Program-program tersebut dapat terlaksana sesuai dengan yang diharapkan dengan menitikberatkan pada program prioritas.

1.4 Sistematika Penyusunan

Sistematika penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2025 berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah:

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- 2.4 Review terhadap rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja
- 3.4 Program dan Kegiatan

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELKSANAAN RENJA OPD

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD

Pelaksanaan evaluasi sebagai salah satu fungsi peningkatan kualitas kinerja instansi pemerintah, dilaksanakan guna mengetahui program/kegiatan yang tidak memenuhi target, telah memenuhi target ataupun melebihi target kinerja yang direncanakan sesuai target kinerja dalam Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2025 didasarkan pada Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2024- 2026 Untuk Mengetahui:

1. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
2. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
3. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

REKAPITULASI HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD SAMPAI DENGAN TAHUN 2025
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA

Kode	Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan program/kegiatan	Indikator kinerja program (outcome)/kegiatan (output)	Target kinerja capaian Program Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2026	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2026	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan SKPD tahun (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja SKPD Tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2024
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)	Tingkat realisasi (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)
2 3 1	0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH	persentase pemenuhan urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100,00%					

REKAPITULASI HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD SAMPAI DENGAN TAHUN 2025
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA

						AN DAERAH KABUPATEN/ KOTA																
2		1		0																		
2	3	1	0	1	2	0	1	Perencanaan, Penganggaran , dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	1	Dok uma en											
2	3	1	0	1	2	0	1	0	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	Dok ume n								Dok ume n	0%	
2	3	1	0	1	2	0	2	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	jumlah kegiatan administrasi keuangan daerah	6	Dok ume n										
2	3	1	0	1	2	0	2	0	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1 3 2	OB										
2	3	1	0	1	2	0	2	0	Penyediaan Administrasi Tugas ASN	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	1	Dok ume n							1 - 0	dok		

REKAPITULASI HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD SAMPAI DENGAN TAHUN 2025
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA

							Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD													
2	1	0	2	0	3	1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	laporan										
2	1	0	2	0	3	1	Administrasi Umum Perangkat Daerah	jumlah kegiatan administrasi umum perangkat daerah	6	Kegiatan										
2	1	0	2	0	3	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	40	Paket							20	paket	50%	
2	1	0	2	0	3	1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Paket										

REKAPITULASI HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD SAMPAI DENGAN TAHUN 2025
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA

2	1	0	2	0	0	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga Yang Disediakan	1	Paket									
2	1	0	2	0	0	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2	Paket							1	Paket	50 %
2	1	0	2	0	0	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket									
2	1	0	2	0	0	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1	Dokumen									
2	1	0	2	0	0	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	Laporan						5	Laporan	48%	
2	1	0	2	0	8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	terlaksananya kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan	1	4	Kegiatan								

REKAPITULASI HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD SAMPAI DENGAN TAHUN 2025
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA

							Pemerintahan Daerah		pemerintahan daerah										
2	1	0	2	0	0	0	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6	Laporan						3	Laporan	50 %
2	1	0	2	0	0	0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan						8	Laporan	82,69%
2	1	0	2	0	0	3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	6	Laporan						3	Laporan	66,38%
2	1	0	2				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah		Unit								
2	1	0	2	0	0	9	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	2	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang	4	Unit						2	Unit	50%

REKAPITULASI HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD SAMPAI DENGAN TAHUN 2025
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA

				Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya																					
2	1	0	2	0	9	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Llainnya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1	2	Unit									7	Unit	58,3	3%			
2	1	0	2				PROGRAM PENIMGKATA N KERJASAMA DESA	PERSENTASE PENIMGKATAN KERJASAMA DESA	1	0	%															
2	1	0	2				Fasilitasi Kerjasama antar Desa	Jumlah Kerjasama antar Desa	3	Dok ume n																
2	1	0	2	0	1	2	Fasilitasi Kerjasama Antar Desa Dengan Pihak Ketiga dalam Kab/Kota	Jumlah Dokumen Kerjasama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kab/Kota	3	Dok ume n										0						

REKAPITULASI HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD SAMPAI DENGAN TAHUN 2025
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA

				Kabupaten/Kota																
2	1	0	4	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	PERSENTASE PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA		1 0 0	%												
2	1	0	4	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan administrasi Pemerintahan Desa	3	Dokumen													
2	1	0	4	2	0	1														
2	1	0	4	2	0	1	8													
2	1	0	4	PROGRAM PEMERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN ,LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT	PERSENTASE PEMERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN ,LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT	1 0 0	%													
2	1	0	5	2																

REKAPITULASI HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD SAMPAI DENGAN TAHUN 2025
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA

				AGA ADAT DAN MASYARAKA T HUKUM ADAT	HUKUM ADAT													
2	1	3	0	5	2	0	1	Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta pemberdayaan Masyarakat Hukum adat yang masyarakat pelakunya Hukum adat yang sama dalam Daerah Kabupaten/Ko	Jumlah Pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah kab/kota dalam satu daerah provinsi									

REKAPITULASI HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD SAMPAI DENGAN TAHUN 2025 **KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA**

2	1	3	0	5	0	0	0	0	0	0	0	1	9	Lem bag a	50 %
					Peninglatan Kapasitas kelembagaan Lembaga Lkemasyarakatan Desa(RT,RW,PKK,Po syandu,LPM dan Karang Taruna) Lembaga adat desa /Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan(RT, RW,PKK,Posyandu,L PMdan Karang Taruna)Lembaga Adat Desa/Keluarahan,ad a Masyarakat Hukum Adat Yang Di tingkatnya Kapasitasnya	3	8	6	Lem baga					
2	1	3	0	5	0	0	0	0	0	0	0	1	0	lapo ran	

REKAPITULASI HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD SAMPAI DENGAN TAHUN 2025 KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA

2	1	0	5	2	0	0	0	6	1	Dok ume n				0	Dok ume n

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Padang Lawas Utara didasarkan pada kajian capaian Kinerja.Pelayanan Sesuai Indikator Kinerja yang telah ditetapkan dalam rencana strategis.Dengan Demikina dapat disajikan table analisis Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarkat dan Desa Sebagai Berikut:

Tabel 2.2 Indikator kinerja kunci Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	Indikator	SMP/Standar Nasional	IKU	Target Tenstra Perangkat Daerah			Realisasi Capaian			Proyeksi			Catatan Analisis
				Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
	IKU												
1	Indeks Desa Membangun (IDM)		Permendesa PDTT Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun	Desa maju 10,Desa Berke mbang 125,te rtingga l 184	Desa maju 10,Desa Berke mbang 125,te rtingga l 184	Desa maju 10,Desa Berke mbang 125,te rtingga l 184							
2	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		Nilai evaluasi AKIP adalah nilai perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintahan untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja	78.00	80.00	82.00							-

Renja PMD 2025

			instansi pemerintah yang disusun secara periodik.												
3	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		Indeks Kepuasan Masyarakat adalah hasil dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat / pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberlakukan oleh penyelenggaraan Pelayanan Publik	63.92	68.92	73.92									
Indikator	SM P/ Standar Nasional	IKK		Target Tenstra Perangkat Daerah			Realisasi Capaian		Proyeksi		Tahun 2026	Tahun 2025	Tahun 2024	Catatan Analisis	
				Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2024	Tahun 2025		
1	Rata - rata jumlah Kelompok binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat(LPM)		Jumlah kelompok binaan LPM / Jumlah LPM	60 Desa	60 Desa	70 Desa									
2	Rata - rata jumlah Kelompok binaan PKK		Jumlah Kelompok Binaan PKK / Jumlah PKK	80 Desa	100 Desa	120 Desa									
3	Perse ntase PKK aktif		Jumlah PKK Aktif / Jumlah PKK	320 Desa	340 Desa	386 Desa									
4	Perentase LSM Aktif		Jumlah LSM Aktif / Jumlah LPM	45 Desa	50 Desa	55 Desa									
5	Pertse ntase LPM Berpre		Jumlah LPM Berprestasi / Jumlah LPM	35 Desa	40 Desa	45 Desa									

Renja PMD 2025

	stase											
6	Persen tase Poaya ndu Aktif		Jumlah Posyandu Aktif / Total Posyandu	276 Posya ndu	283 Posya ndu	324 Posya ndu						

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Dengan kewenangan yang diberikan kepada daerah dalam menentukan pola organisasinya, maka Pemerintah Daerah memerlukan dukungan kemampuan teknis dan wawasan yang luas dalam merumuskan, mendesain dan mengimplementasikan visi dan misi pemerintah daerah kedalam pola organisasi pemerintah daerah, dengan organisasi pemerintah kabupaten merupakan wadah bagi pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah dan sebagai proses interaksi antara pemerintah institusi daerah lainnya dan dengan masyarakat sebagai pilar-pilar pembangunan daerah.

Di tahun 2025 perlu kinerja yang lebih optimal untuk Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Padang Lawas Utara. Hal ini disebabkan secara umum Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Padang Lawas Utara belum mengalami kemajuan yang berarti. Namun hal ini tidak serta merta menjadi alasan untuk tidak tercapainya target yang telah dituangkan dalam RPD, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tetap berkomitmen untuk merealisasikan Program dan Kegiatan yang ada dalam RPD sampai dengan akhir tahun 2024. Langkah-langkah preventif yang dilaksanakan adalah dengan melakukan kajian dan analisis terhadap program dan kegiatan yang ada, program dan kegiatan yang tertunda, mengintensifkan Rapat-rapat koordinasi dengan semua OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara serta mengintensifkan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Aparatur Sipil Negara berdasarkan kewenangan jabatannya masing-masing.

➤ **Tingkat kinerja pelayanan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Padang Lawas Utara.**

Dalam rangka pelayanan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Padang Lawas Utara pada Rencana Kerja (Renja) Tahun Rencana 2025 aparatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Padang Lawas Utara meliput:

- | | |
|----------------------------|----------|
| 1. Kepala Dinas | 1 orang. |
| 2. Sekretaris Dinas | 1 orang. |
| 3. Kasubbag di Sekretariat | 2 orang. |
| 4. Kepala Bidang | 4 orang. |
| 5. Fungsional Perencana | 9 orang. |
| 6. Fungsional PSM | 8 orang. |
| 7. Fungsional Pelaksana | 4 orang |

Selain di atas pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2025 semakin meningkat dengan tersedianya tenaga teknis yang melayani keperluan masyarakat desa dan aparatur Pemerintahan Desa secara riil, baik di lapangan maupun di kantor, dengan ditunjang oleh Tenaga THL yang ada di kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Padang Lawas Utara adalah sebanyak 29 orang.

➤ **Permasalahan dan hambatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Padang Lawas Utara.**

1. Masih rendahnya pemahaman dan kapasitas aparat desa terkait pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta peraturan yang terkait. Akibatnya, Undang-Undang tersebut belum bisa dilaksanakan secara optimal.
2. Belum optimalnya pengelolaan keuangan dan aset desa;
3. Belum optimalnya fungsi lembaga permasarakatan desa di pedesaan;
4. Masih rendahnya pemahaman akan tugas pokok dan fungsi badan

- permusyawaratan desa;
5. Masih rendahnya pemahaman akan tugas pokok dan fungsi kader PP yang ada di desa;
 6. Masih rendahnya pencapaian jumlah desa berkembang, maju dan mandiri;
 7. Belum terbentuknya pos pelayanan teknologi di tingkat kecamatan maupun Desa;
 8. Masih Rendahnya Persentase desa yang telah membentuk badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Serta BUMDes yang Mandiri;
 9. Belum adanya Kegiatan Pembangunan Kawasan pedesaan terpadu.
- **Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan perangkat daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2025**
- Dalam proses pengembangan pelayanan terdapat beberapa tantangan yang harus dihadapi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Padang Lawas Utara antara lain :
- Penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat belum optimal;
 - Kualitas perencanaan pembangunan desa yang masih rendah;
 - Minimnya partisipasi lembaga kemasyarakatan desa dalam proses pembangunan desa;
 - Kapasitas lembaga ekonomi pedesaan masih rendah dalam menggerakkan perekonomian masyarakat desa;
 - Masih minimnya pemanfaatan teknologi tepat guna oleh masyarakatpedesaan;
 - Masih rendahnya kesadaran masyarakat desa dalam menjaga dan memelihara kegiatan fisik yang telah dibangun.
- **Formulasi isu-isu penting**

Berdasarkan identifikasi permasalahan, dampak terhadap peluang dan tantangan dalam meningkatkan pelayanan OPD, maka isu-isu strategis urusan pemberdayaan masyarakat dan desa Kabupaten Padang Lawas Utara sesuai prioritas dapat ditentukan sebagai berikut:

- Mengoptimalkan kegiatan pelatihan manajemen dan administrasi penyelenggaraan pemerintahan desa;
- Melakukan pengawasan dan monitoring terhadap pengelolaan aset dan kekayaan desa;
- Melakukan fasilitaserta monitoring secara berkala terhadap pembentukan badan usaha milik desa (BUMDes) serta pelatihan manajemen BUMDes sehingga dapat terbentuk BUMDes yang mandiri;
- Melaksanakan pemilihan kepala desa yang demokratif dan transparan;
- Mensosialisasikan kepada masyarakat desa berdasarkan potensi desa terhadap alat-alat inovasi teknologi tepat guna yang dihasilkan pada gelaran jambore teknologi tepat guna;
- Menetapkan prioritas-prioritas penggunaan dana desa yang akan dilaksanakan oleh desa.

2.4 Review terhadap Rancangan Renja Dinas Pembedayan Masyarakat dan Desa

Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel bahwa semua program dan kegiatan sesuai dengan rancangan awal RPD. Hal ini disebabkan karena program dan kegiatan telah sesuai dengan kebutuhan. Namun untuk besaran anggaran yang diajukan tidak sesuai dengan kebutuhan yang diajukan yang dikarenakan adanya penyesuaian anggaran yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara.

NO	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		persentase pemenuhan urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100,00%	6.383.212.791	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		persentase pemenuhan urusan pemerintah daerah kabupaten/ko ta	100,00%	6.383.212.791		
i	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	2 Kegiatan	2.154.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		jumlah dokumen Perencanaan , Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	2 Kegiatan	2.154.000		
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	KAB. PAL UTA	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	2.154.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	KAB. PAL UTA	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	2.154.000		
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	KAB. PAL UTA	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	KAB. PAL UTA	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan			
ii	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		jumlah kegiatan administrasi keuangan daerah	Dokumen	5.603.327.191	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		jumlah kegiatan administrasi keuangan daerah	Dokumen	5.603.327.191		
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	KAB. PAL UTA	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	23 Orang /bulan	5.446.247.191	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	KAB. PAL	Penyediaan Gaji dan Tunjangan	23 Orang /bulan	5.446.247.191		

NO	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		persentase pemenuhan urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100,00%	6.383.212.791	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		persentase pemenuhan urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100,00%	6.383.212.791		
2	Penyediaan Administrasi Tugas ASN	KAB. PAL UTA	Jumlah Dokumen Hasil Penyedia Administrasi Pelaksanaan Yugas ASN	1 Dokumen	157.080.000	Penyediaan Administrasi Tugas ASN	KAB. PAL UTA	Jumlah Dokumen Hasil Penyedia Administrasi Pelaksanaan Yugas ASN	1 Dokumen	157.080.000		
3	Koordinasi dan Penyusuan Laporan Keuangan Akhir tahun SKPD	KAB. PAL UTA	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen		Koordinasi dan Penyusuan Laporan Keuangan Akhir tahun SKPD	KAB. PAL UTA	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 Laporan			
iii	Administrasi Umum Perangkat Daerah	KAB. PAL UTA	jumlah kegiatan administrasi umum perangkat daerah	6 Kegiatan	411.301.600	Administrasi Umum Perangkat Daerah	KAB. PAL UTA	jumlah kegiatan administrasi umum perangkat daerah	6 Kegiatan	411.301.600		
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	KAB. PAL UTA	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	40 Paket	3.116.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	KAB. PAL UTA	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	40 Paket	3.116.000		

NO	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		persentase pemenuhan urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100,00%	6.383.212.791	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		persentase pemenuhan urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100,00%	6.383.212.791		
2	Penyedian Peralatan dan Perlengkapan Kantor	KAB. PAL UTA	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	78.378.700	Penyedian Peralatan dan Perlengkapan Kantor	KAB. PAL UTA	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	78.378.700		
3	Penyedian Peralatan Rumah Tangga	KAB. PAL UTA	Jumlah Paket Penyedian Peralatan Rumah Tangga yang di sediakan	1 Paket	7.788.100	Penyedian Peralatan Rumah Tangga	KAB. PAL UTA	Jumlah Paket Penyedian Peralatan Rumah Tangga yang di sediakan	1 Paket	7.788.100		
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	KAB. PAL UTA	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	17.270.800	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	KAB. PAL UTA	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	17.270.800		
5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	KAB. PAL UTA	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	18.630.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	KAB. PAL UTA	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	18.630.000		
6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	KAB. PAL UTA	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	30.930.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	KAB. PAL UTA	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	30.930.000		
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	KAB. PAL UTA	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120 Laporan	255.188.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	KAB. PAL UTA	Jumlah Laporan Penyelenggaran Rapat Koordinasi dan	120 Laporan	255.188.000		

NO	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		persentase pemenuhan urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100,00%	6.383.212.791	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		persentase pemenuhan urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100,00%	6.383.212.791		
								Konsultasi SKPD				
iv	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	KAB. PAL UTA	terlaksananya kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	4 Kegiatan	280.920.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	KAB. PAL UTA	terlaksananya kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	4 Kegiatan	280.920.000		
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	KAB. PAL UTA	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	6.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	KAB. PAL UTA	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	6.000.000		
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	KAB. PAL UTA	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	58.920.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	KAB. PAL UTA	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	58.920.000		
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	KAB. PAL UTA	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 Laporan	216.000.000	Penyediaan Jasa Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	KAB. PAL UTA	Jumlah Pemakaian Internet	12 Laporan	216.000.000		
v	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan	2 Kegiatan	85.510.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan	2 Kegiatan	85.510.000		

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		persentase pemenuhan urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100,00%	6.383.212.791	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		persentase pemenuhan urusan pemerintah daerah kabupaten/ko ta	100,00%	6.383.212.791		
			pemerintah daerah					pemerintah daerah				
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	KAB. PAL UTA	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	78.190.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	KAB. PAL UTA	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	78.190.000		
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	KAB. PAL UTA	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	7.320.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	KAB. PAL UTA	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	7.320.000		
vi	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	KAB. PAL UTA	Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	1 Kegiatan		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	KAB. PAL UTA	Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	1 Kegiatan			
1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	KAB. PAL UTA	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	KAB. PAL UTA	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit			

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		persentase pemenuhan urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100,00%	6.383.212.791	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		persentase pemenuhan urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100,00%	6.383.212.791	
i	Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa	KAB. PAL UTA	Jumlah pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa	1 Dokumen		Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa	KAB. PAL UTA	Jumlah pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa	1 Dokumen		
I	Pembinaan peningjatan kapasitas aparatur pemerintahan desa	KAB. PAL UTA	Jumlah aparatur pemerintahan desa yang mengikuti pembinaan peningkatan kapasitas	3 Dokumen		Pembinaan peningjatan kapasitas aparatur pemerintahan desa	KAB. PAL UTA	Jumlah aparatur pemerintahan desa yang mengikuti pembinaan peningkatan kapasitas	3 Dokumen		
2	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan kelurahan	KAB. PAL UTA	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan kelurahan	1 Dokumen	60.002.400	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan kelurahan	KAB. PAL UTA	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan kelurahan	1 Dokumen	60.002.400	
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN,LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	KAB. PAL UTA	PERSENTASE PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN,LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	100%	2.060.000.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN,LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	KAB. PAL UTA	PERSENTASE PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN,LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	100%	2.060.000.000	

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		persentase pemenuhan urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100,00%	6.383.212.791	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		persentase pemenuhan urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100,00%	6.383.212.791	
I	Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Ada Tingkat Dearah Kabupaten/kota serta pemberdayaan Masyarakat pelakunya Hukum adat yang sama daeraah kabupaten/Kota	KAB. PAL UTA	Jumlah kegiatan pemberdayaan Kemasyarakatan yamg bergerak di bidang Pemberdayaan desa dan Lembaga adat tingkat daerah Provinsi serta pemberdayaan Masyarakat Hukum adat	3 Dokumen	2.060.000.000	Program Penempatan Tenaga Kerja	KAB. PAL UTA	Persetase Penempatan Tenaga Kerja		2.060.000.000	
1	Peningkatan kapasitas kelembagaan lembaga kemasyarakatan Desa/Kelurahan(RT,RW,PKK,POS YANDU,LPM dan Karang Taruna) Lembaga adat desa/kelurahan dan masyarakat Hukum adat yang di tingkatkan kapasitasnya	KAB. PAL UTA	Jumlah kelembagaan lembaga kemasyarakatan Desa/Kelurahan(RT,RW,PKK,POS YANDU,LPM dan Karang Taruna) Lembaga adat desa/kelurahan dan masyarakat Hukum adat yang di tingkatkan kapasitasnya	386 Lembaga	1.000.000.000	Peningkatan kapasitas kelembagaan lembaga kemasyarakatan Desa/Kelurahan(RT,RW,PKK,POS YANDU,LPM dan Karang Taruna) Lembaga adat desa/kelurahan dan masyarakat Hukum adat	KAB. PAL UTA	Jumlah kelembagaan lembaga kemasyarakatan Desa/Kelurahan(RT,RW,PKK,POS YANDU,LPM dan Karang Taruna) Lembaga adat desa/kelurahan dan masyarakat Hukum adat	386 Lembaga	1.000.000.000	
2	Fasilitasi Pemerintahan Desa dalam Pemanfaatan Tekhnologi Tepat Guna	KAB. PAL UTA	Jumlah laporan Hasil Fasilitasi Pemerintahan Desa dalam pemanfaatan Tekhnologi Tepat guna	1 Laporan	60.000.000	Fasilitasi Pemerintahan Desa dalam Pemanfaatan Tekhnologi Tepat Guna	KAB. PAL UTA	Jumlah laporan Hasil Fasilitasi Pemerintahan Desa dalam pemanfaatan Tekhnologi Tepat guna	1 Laporan	60.000.000	

NO	Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan						Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		persentase pemenuhan urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	100,00%	6.383.212.791	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		persentase pemenuhan urusan pemerintah daerah kabupaten/ko ta	100,00%	6.383.212.791			
3	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	KAB. PAL UTA	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1 Dokumen	1.000.000.000	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	KAB. PAL UTA	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggar aan Gerakan Pemberdayaa n Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1 Dokumen	1.000.000.000			
					8.563.215.191					8.563.215.191			

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dengan pertimbangan prinsip penyelenggaraan pemerintah yang baik dengan memperhatikan hasil musrenbang mulai dari tingkat desa yang ditindak lanjuti sampai dengan tingkat kabupaten, responsif terhadap permasalahan serta isu-isu strategis, efesien dalam perencanaan anggaran dan efektif dalam pencapaian tujuan. Dengan demikian rencana kerja ini tidak hanya memenuhi kepentingan perangkat daerah saja melainkan juga dapat menjawab permasalahan yang ada di masyarakat khususnya terkait dengan perumusan kebijakan-kebijakan pemerintah daerah, penyelenggaraan administrasi pemerintahan, penatalaksanaan organisasi, serta memberikan fasilitasi administrasi kepada seluruh perangkat daerah. Namun, pada tahun 2025 tidak ada usulan program dan kegiatan yang diusulkan oleh pemangku kepentingan untuk Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi.

Kebijakan merupakan pedoman umum pelaksanaan tindakan yaitu ketentuan-ketentuan yang harus dijadikan pedoman, pegangan dan petunjuk dalam melaksanakan kegiatan sehingga tujuan dan sasaran dapat tercapai sebagaimana diharapkan. Kebijakan Nasional tertuang didalam RPD dan juga dirumuskan dalam Rencana Kerja Pemerintah. dengan prioritas yaitu :

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing;
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim;
7. Memperkuat stabilitas politik dan transformasi pelayanan publik.

3.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan dan Sasaran adalah tahapan perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka pendek (satu tahun) yang selanjutnya akan menjadi dasar pengukuran kinerja perangkat daerah selama satu tahun yang terakumulasi dalam 3 tahun RPD. Adapun tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada Renja Tahun 2025 dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran renstra dan RPD dirumuskan sebagai berikut :

Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran Dinas Pembardayaan Masyarakat Dan Desa Tahun 2025

No.	Prioritas	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran
1.		Mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang akuntabel, demokratif, bersih dan berkualitas	Meningkatnya tertib administrasi manajemen pemerintahan desa	Lomba Desa	10 desa
				Jumlah BDP aktif	100%
			Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan desa yang berkualitas	Profil desa terupdate	50%
				Jumlah LPM aktif	100%
2.	Prioritas dua	Meningkatkan lembaga ekonomi pedesaan dan peranan aktif perempuan pedesaan dalam usaha ekonomi	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi masyarakat	Terbentuknya BUMDes	10 BUMDes

		produktif.			
				Jumlah BUMDes mandiri	30%
				Pembentukan posyantek	10 posyantek
			Meningkatnya peran aktif perempuan pedesaan	kelompok binaan PKK	3 Kelompok
				Kelompok usaha ekonomi produkif perempuan	60%

3.3 Program dan Kegiatan

Setiap program pada dasarnya menyebar ke seluruh desa dan kecamatan di Kabupaten Padang Lawas Utara, karena sasaran program adalah seluruh masyarakat, lembaga masyarakat perdesaan dan pemerintahan desa, Namun ada program yang bersifat spesifik diarahkan dengan pertimbangan kawasan seperti kegiatan perlombaan desa/ kelurahan dan pengembangan teknologi tepat guna, dimana kegiatan tersebut diarahkan pada kawasan yang mempunyai keunggulan tertentu. Disamping itu ada pula kegiatan yang diarahkan pada kelompok masyarakat tertentu diantaranya kegiatan pembinaan kelompok usaha ekonomi desa, peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa, peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa serta peningkatan peran perempuan di pedesaan. Kebutuhan dana kegiatan secara total sangat bervariasi setiap tahunnya oleh karenanya prioritas kegiatan menjadi pertimbangan dalam menyusun rencana program /kegiatan/ subkegiatan setiap tahunnya. Selanjutnya program/kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Padang Lawas Utara dirumuskan disesuaikan dengan usulan hasil musrenbang yang dikombinasikan dengan kebijakan pemerintah daerah serta program yang diseuaikan dengan kebijakan pemerintah pusat

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRA M / KEGIATA N / SUB KEGIATA N	TARG ET AKHIR PERIO DE RENST RA OPD	REALI SASI CAPAI AN RENJ A OPD TAHU N 2023	PRAKI RAAN CAPAI AN TARGE T RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KE LOMP OK SASAR AN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERAN GKAT DAERAH PENANGG UNG JAWAB				
							TAR GET 2025	PAGU INDIKATI F (Rp)	L OKASI	SUMBER DANA	PRIORI										
											TAS	NASIONAL	DAERAH								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA							7.580.153.313,00							8.525.996.976,00					
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						7.580.153.313,00								8.525.996.976,00					
	2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA						7.580.153.313,00								8.525.996.976,00					
1,	2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	-	-			-	6.126.138.813,00						-	6.399.395.176,00						

Renja PMD 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRA M / KEGIATA N / SUB KEGIATA N	TARG ET AKHIR PERIO DE RENST RA OPD	REALI SASI CAPAI AN RENJ A OPD TAHU N 2023	PRAKI RAAN CAPAI AN TARGE T RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KE LOMP OK SASAR AN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERAN GKAT DAERAH PENANGG UNG JAWAB				
							TAR GET 2025	PAGU INDIKATI F (Rp)	L OKASI	SUMBER DANA	PRIORI TAS										
											NASIO NAL	DAER AH									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
	2.13.01.2.0 1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	1 dokumen			-	19.185.90 0,00			Memb anggu n dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerintahan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Pening katan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif Pelaksanaan Reformasi masih Birokra si	OPD	1 dokumen	12.654.00 0,00	DINAS PEMERINTAHAN MASYARAKAT DAN DESA					
	2.13.01.2.0 1.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																			

Renja PMD 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRA M / KEGIATA N / SUB KEGIATA N	TARG ET AKHIR PERIO DE RENST RA OPD	REALI SASI CAPAI AN RENJ A OPD TAHU N 2023	PRAKI RAAN CAPAI AN TARGE T RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KE LOMP OK SASAR AN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERAN GKAT DAERAH PENANGG UNG JAWAB		
							TAR GET 2025	PAGU INDIKATI F (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORI TAS			NASIO NAL	DAER AH			
											TAR GET	PAGU INDIKATI F (Rp)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen				1 Dokumen	8.959.800,00	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	OPD	1 Dokumen	2.154.000,00	DINAS PEMERD AYAAN MASYARA KAT DAN DESA		
	2.13.01.2.0 1.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																

Renja PMD 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRA M / KEGIATA N / SUB KEGIATA N	TARG ET AKHIR PERIO DE RENST RA OPD	REALI SASI CAPAI AN RENJ A OPD TAHU N 2023	PRAKI RAAN CAPAI AN TARGE T RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KE LOMP OK SASAR AN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERAN GKAT DAERAH PENANGG UNG JAWAB		
							TAR GET 2025	PAGU INDIKATI F (Rp)	L OKASI	SUMBER DANA	PRIORI TAS			NASIO NAL	DAER AH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					5 Laporan	10.226.10 0,00	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memb anggun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	OPD		10.500.00 0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		
	2.13.01.2.0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaa	23 Orang 132 orang/ TA			23 Orang 132 orang/ TA 2 Laporan	5.367.072. 413,00			Memb anggun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	OPD	23 Orang 132 orang/ TA	5.619.008. 376,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		

Renja PMD 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRA M / KEGIATA N / SUB KEGIATA N	TARG ET AKHIR PERIO DE RENST RA OPD	REALI SASI CAPAI AN RENJ A OPD TAHU N 2023	PRAKI RAAN CAPAI AN TARGE T RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KE LOMP OK SASAR AN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERAN GKAT DAERAH PENANGG UNG JAWAB	
							TAR GET 2025	PAGU INDIKATI F (Rp)	L OKASI	SUMBER DANA	PRIORI TAS		NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
			n tugas ASN Jumlah Laporan kegiatan administrasi keuangan daerah															
	2.13.01.2.0 2.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	23 Orang/bulan			23 Orang/bulan	5.202.394.013,00	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	OPD	23 Orang/bulan	5.451.428.376,00	DINAS PEMERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		

Renja PMD 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRA M / KEGIATA N / SUB KEGIATA N	TARG ET AKHIR PERIO DE RENST RA OPD	REALI SASI CAPAI AN RENJ A OPD TAHU N 2023	PRAKI RAAN CAPAI AN TARGE T RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KE LOMP OK SASAR AN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERAN GKAT DAERAH PENANGG UNG JAWAB				
							TAR GET 2025	PAGU INDIKATI F (Rp)	L OKASI	SUMBER DANA	PRIORI TAS										
											NASIO NAL	DAER AH									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
2.13.01.2.0 2.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	154.560.00,00	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	OPD	1 Dokumen	157.080,00,00	DINAS PEMERD AYAAN MASYARA KAT DAN DESA								

Renja PMD 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRA M / KEGIATA N / SUB KEGIATA N	TARG ET AKHIR PERIO DE RENST RA OPD	REALI SASI CAPAI AN RENJ A OPD TAHU N 2023	PRAKI RAAN CAPAI AN TARGE T RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KE LOMP OK SASAR AN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERAN GKAT DAERAH PENANGG UNG JAWAB				
							TAR GET 2025	PAGU INDIKATI F (Rp)	L OKASI	SUMBER DANA	PRIORI TAS										
											NASIONAL	DAERAH									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
													kinan								
2.13.01.2.0 2.0005			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				4 Laporan	10.118.40 0,00	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memb angun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerintahan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Peningkata n Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	OPD		10.500.00 0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					

Renja PMD 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRA M / KEGIATA N / SUB KEGIATA N	TARG ET AKHIR PERIO DE RENST RA OPD	REALI SASI CAPAI AN RENJ A OPD TAHU N 2023	PRAKI RAAN CAPAI AN TARGE T RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KE LOMP OK SASAR AN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERAN GKAT DAERAH PENANGG UNG JAWAB				
							TAR GET 2025	PAGU INDIKATI F (Rp)	L OKASI	SUMBER DANA	PRIORI TAS										
											NASIONAL	DAERAH									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
	2.13.01.2.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen administrasi umum perangkat daerah	3790 eksem pler 2 jenis 1 paket 120 laporan 1 paket 40 set 1 paket			1 Dokumen	357.111.9 00,00			Menin gkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkata n Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif Pelaksanaa n Reformasi Birokrasi	OPD	3790 eksem pler 2 jenis 1 paket 120 laporan 1 paket 40 set 1 paket	401.302.8 00,00	DINAS PEMERD AYAAN MASYARA KAT DAN DESA					
	2.13.01.2.0 6.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																			

Renja PMD 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRA M / KEGIATA N / SUB KEGIATA N	TARG ET AKHIR PERIO DE RENST RA OPD	REALI SASI CAPAI AN RENJ A OPD TAHU N 2023	PRAKI RAAN CAPAI AN TARGE T RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KE LOMP OK SASAR AN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERAN GKAT DAERAH PENANGG UNG JAWAB		
							TAR GET 2025	PAGU INDIKATI F (Rp)	L OKASI	SUMBER DANA	PRIORI TAS			TAR GET	PAGU INDIKATI F (Rp)			
											NASIO NAL	DAER AH						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	40 Paket				40 Paket	5.067.200,00	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Menin gkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkata n Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif Pelaksanaa n Reformasi masi Birokrasi	OPD	40 Paket	3.116.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		
	2.13.01.2.0 6.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkap an Kantor yang Disediakan	1 Paket				1 Paket	55.196.20 0,00	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Menin gkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkata n Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif Pelaksanaa n Reformasi masi Birokrasi	OPD	1 Paket	58.379.90 0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		

Renja PMD 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRA M / KEGIATA N / SUB KEGIATA N	TARG ET AKHIR PERIO DE RENST RA OPD	REALI SASI CAPAI AN RENJ A OPD TAHU N 2023	PRAKI RAAN CAPAI AN TARGE T RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KE LOMPOK SASAR AN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERAN GKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TAR GET 2025	PAGU INDIKATI F (Rp)	L OKASI	SUMBER DANA	PRIORI TAS			TAR GET	PAGU INDIKATI F (Rp)			
											NASIO NAL	DAER AH						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
													si					
	2.13.01.2.0 6.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket				1 Paket	8.746.900,00	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Menin gkatkan Sumbe r Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pening katan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif Pelaks anaa n Refor masi Birokra si	OPD	1 Paket	7.788.100,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		
	2.13.01.2.0 6.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																

Renja PMD 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRA M / KEGIATA N / SUB KEGIATA N	TARG ET AKHIR PERIO DE RENST RA OPD	REALI SASI CAPAI AN RENJ A OPD TAHU N 2023	PRAKI RAAN CAPAI AN TARGE T RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KE LOMP OK SASAR AN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERAN GKAT DAERAH PENANGG UNG JAWAB		
							TAR GET 2025	PAGU INDIKATI F (Rp)	L OKASI	SUMBER DANA	PRIORI TAS			NASIO NAL	DAER AH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket			2 Paket	17.270.80 0,00	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Menin gkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkata n Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif Pelaksanaa n Reformasi Birokrasi	OPD	2 Paket	17.270.80 0,00	DINAS PEMERINTAHAN MASYARAKAT DAN DESA		
	2.13.01.2.0 6.0005		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan															
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket			1 Paket	2.098.800, 00	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Menin gkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkata n Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif Pelaksanaa n Reformasi Birokrasi	OPD	1 Paket	18.630.00 0,00	DINAS PEMERINTAHAN MASYARAKAT DAN DESA		

Renja PMD 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRA M / KEGIATA N / SUB KEGIATA N	TARG ET AKHIR PERIO DE RENST RA OPD	REALI SASI CAPAI AN RENJ A OPD TAHU N 2023	PRAKI RAAN CAPAI AN TARGE T RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KE LOMP OK SASAR AN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERAN GKAT DAERAH PENANGG UNG JAWAB	
							TAR GET 2025	PAGU INDIKATI F (Rp)	L OKASI	SUMBER DANA	PRIORI TAS			TAR GET	PAGU INDIKATI F (Rp)			
											NASIO NAL	DAER AH						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
													si					
		2.13.01.2.0 6.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan															
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang -Undangan yang Disediakan	1 Dokumen				1 Dokumen	30.930.00 0,00	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Menin gkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pening katan Tata Kelola Pem erintah an yang Berkualitas dan Inovatif Pelaks anaa n Refor masi Birokra si	OPD	1 Dokumen	30.930.00 0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARA KAT DAN DESA		
		2.13.01.2.0 6.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD															

Renja PMD 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRA M / KEGIATA N / SUB KEGIATA N	TARG ET AKHIR PERIO DE RENST RA OPD	REALI SASI CAPAI AN RENJ A OPD TAHU N 2023	PRAKI RAAN CAPAI AN TARGE T RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KE LOMP OK SASAR AN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERAN GKAT DAERAH PENANGG UNG JAWAB				
							TAR GET 2025	PAGU INDIKATI F (Rp)	L OKASI	SUMBER DANA	PRIORI TAS										
											NASIONAL	DAERAH									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
		Jumlah Laporan Penyeleng garaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	120 Laporan				120 Laporan	237.802.0 00,00	Kab. Padan g Lawas Utara, Semua Kecam atan, Semua Kel/De sa	DANA TRANSF ER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Menin gkatkan Sumbe r Daya Manusi a Yang Berkua litas Dan Berday a Saing	Pening kata n Tata Kelola Pem erintah an yang Berkua litas dan Inovatif Pelaks anaa n Refor masi Birokra si	OPD	120 Laporan	265.188.0 00,00	DINAS PEMBERD AYAAN MASYARA KAT DAN DESA					
	2.13.01.2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan terlaksana ny kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah an daerah	12 laporan 6 OB 600 lembar			3 Laporan	289.008.6 00,00			Memb anggu n dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertu mbuhan Ekono mi, P emerataan Ekono mi, dan Pembe	Pening kata n Tata Kelola Pem erintah an yang Berkua litas dan Inovatif Pelaks anaa n Refor masi Birokra si	OPD	12 laporan 6 OB 600 lembar	280.920.0 00,00	DINAS PEMBERD AYAAN MASYARA KAT DAN DESA					

Renja PMD 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRA M / KEGIATA N / SUB KEGIATA N	TARG ET AKHIR PERIO DE RENST RA OPD	REALI SASI CAPAI AN RENJ A OPD TAHU N 2023	PRAKI RAAN CAPAI AN TARGE T RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KE LOMP OK SASAR AN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERAN GKAT DAERAH PENANGG UNG JAWAB				
							TAR GET 2025	PAGU INDIKATI F (Rp)	L OKASI	SUMBER DANA	PRIORI TAS										
											NASIO NAL	DAER AH									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
											rantas an Kemis kinan										
	2.13.01.2.0 8.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																			
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	600 Laporan			1 Laporan	6.000.000,00	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memb angun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemis	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	OPD	600 Laporan	6.000.000,00	DINAS PEMERD AYAAN MASYARA KAT DAN DESA						

Renja PMD 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRA M / KEGIATA N / SUB KEGIATA N	TARG ET AKHIR PERIO DE RENST RA OPD	REALI SASI CAPAI AN RENJ A OPD TAHU N 2023	PRAKI RAAN CAPAI AN TARGE T RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KE LOMP OK SASAR AN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERAN GKAT DAERAH PENANGG UNG JAWAB
							TAR GET 2025	PAGU INDIKATI F (Rp)	L OKASI	SUMBER DANA	PRIORI TAS			TAR GET	PAGU INDIKATI F (Rp)		
											NASIO NAL	DAER AH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
2.13.01.2.0 8.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan				12 Laporan	90.120.00 0,00	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	OPD	12 Laporan	58.920.00 0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	

Renja PMD 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRA M / KEGIATA N / SUB KEGIATA N	TARG ET AKHIR PERIO DE RENST RA OPD	REALI SASI CAPAI AN RENJ A OPD TAHU N 2023	PRAKI RAAN CAPAI AN TARGE T RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KE LOMP OK SASAR AN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERAN GKAT DAERAH PENANGG UNG JAWAB				
							TAR GET 2025	PAGU INDIKATI F (Rp)	L OKASI	SUMBER DANA	PRIORI TAS										
											NASIO NAL	DAER AH									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
													kinan								
		2.13.01.2.0 8.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	6 Laporan				12 Laporan	192.888.600,00	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memb angun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif Pelaksanaan Reformasi masih Birokrasi	OPD	6 Laporan	216.000.00,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					

Renja PMD 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRA M / KEGIATA N / SUB KEGIATA N	TARG ET AKHIR PERIO DE RENST RA OPD	REALI SASI CAPAI AN RENJ A OPD TAHU N 2023	PRAKI RAAN CAPAI AN TARGE T RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KE LOMP OK SASAR AN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERAN GKAT DAERAH PENANGG UNG JAWAB	
							TAR GET 2025	PAGU INDIKATI F (Rp)	L OKASI	SUMBER DANA	PRIORI TAS			TAR GET	PAGU INDIKATI F (Rp)		
											NASIO NAL	DAER AH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
												kinan					
	2.13.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	12 Unit 1 paket 4 unit			2 Laporan	93.760,00 0,00				Memb anggu n dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Pening katan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	OPD	12 Unit 0 paket 4 unit	85.510,00 0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Renja PMD 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRA M / KEGIATA N / SUB KEGIATA N	TARG ET AKHIR PERIO DE RENST RA OPD	REALI SASI CAPAI AN RENJ A OPD TAHU N 2023	PRAKI RAAN CAPAI AN TARGE T RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KE LOMP OK SASAR AN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERAN GKAT DAERAH PENANGG UNG JAWAB				
							TAR GET 2025	PAGU INDIKATI F (Rp)	L OKASI	SUMBER DANA	PRIORI TAS										
											NASIO NAL	DAER AH									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
	2.13.01.2.0 9.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																			
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinan nya	4 Unit			4 Unit	81.250.00 0,00	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memb angun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Pening katan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	OPD	4 Unit	78.190.00 0,00	DINAS PEMERD AYAAN MASYARA KAT DAN DESA						
	2.13.01.2.0 9.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																			

Renja PMD 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRA M / KEGIATA N / SUB KEGIATA N	TARG ET AKHIR PERIO DE RENST RA OPD	REALI SASI CAPAI AN RENJ A OPD TAHU N 2023	PRAKI RAAN CAPAI AN TARGE T RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KE LOMP OK SASAR AN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERAN GKAT DAERAH PENANGG UNG JAWAB				
							TAR GET 2025	PAGU INDIKATI F (Rp)	L OKASI	SUMBER DANA	PRIORI TAS										
											NASIO NAL	DAER AH									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit			12 Unit	12.510.00 0,00	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memb angun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	OPD	12 Unit	7.320.000, 00	DINAS PEMERINTAHAN MASYARAKAT DAN DESA					
2,	2.13.03	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Persentase Peningkatan Kerjasama Desa	100 persen			100 persen	60.000.00 0,00						100 persen	0,00						

Renja PMD 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRA M / KEGIATA N / SUB KEGIATA N	TARG ET AKHIR PERIO DE RENST RA OPD	REALI SASI CAPAI AN RENJ A OPD TAHU N 2023	PRAKI RAAN CAPAI AN TARGE T RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KE LOMP OK SASAR AN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERAN GKAT DAERAH PENANGG UNG JAWAB				
							TAR GET 2025	PAGU INDIKATI F (Rp)	L OKASI	SUMBER DANA	PRIORI TAS										
											NASIONAL	DAERAH									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
	2.13.03.2.0 1	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	Jumlah Kegiatan kerjasama antar desa	3 dokumen			1 Dokumen	60.000.00 0,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	DESA	1 dokumen	0,00	DINAS PEMERINTAHAN MASYARAKAT DAN DESA					
	2.13.03.2.0 1.0002	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota																			

Renja PMD 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODENSI RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TAR GET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIONAL	DAERAH						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
		Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/ Kota	3 Dokumen				1 Dokumen	60.000.000,00	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	DESA	1 Dokumen	0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		
3,	2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Peningkatan Administrasi Pemerintahan Desa	100 Persen			100 Persen	60.014.600,00						100 Persen	66.601.800,00			

Renja PMD 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRA M / KEGIATA N / SUB KEGIATA N	TARG ET AKHIR PERIO DE RENST RA OPD	REALI SASI CAPAI AN RENJA OPD TAHU N 2023	PRAKI RAAN CAPAI AN TARGE T RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KE LOMP OK SASAR AN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERAN GKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB				
							TAR GET 2025	PAGU INDIKATI F (Rp)	L OKASI	SUMBER DANA	PRIORI TAS										
											NASIO NAL	DAER AH									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
	2.13.04.2.0 1	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Pembinaan dan Pengawas an penyelenggaraan administrasi pemerintah an desa	1 dokumen 1 dokumen 3 dokumen 3 dokumen			1 Dokumen	60.014.60 0,00			Memb angku n dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekono mi, P emerataan Ekono mi, dan Pembe rantas an Kemiskinan	Pening kata n dari Tata Kelola Pem erintah an yang Berku litas dan Inovatif Pelaks anaa n Refor masi Birokra si	DESA	1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen	66.601.80 0,00	DINAS PEMERD AYAAN MASYARA KAT DAN DESA					
	2.13.04.2.0 1.0005	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa																			

Renja PMD 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRA M / KEGIATA N / SUB KEGIATA N	TARG ET AKHIR PERIO DE RENST RA OPD	REALI SASI CAPAI AN RENJ A OPD TAHU N 2023	PRAKI RAAN CAPAI AN TARGE T RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KE LOMP OK SASAR AN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERAN GKAT DAERAH PENANGG UNG JAWAB				
							TAR GET 2025	PAGU INDIKATI F (Rp)	L OKASI	SUMBER DANA	PRIORI TAS										
											NASIO NAL	DAER AH									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
		Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	386 Orang			3 Orang	60.014.60 0,00	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memb anggun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Peningkata n Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	DESA	386 Orang	6.600.000, 00	DINAS PEMERD AYAN MASYARA KAT DAN DESA						
	2.13.04.2.0 1.0018	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan																			

Renja PMD 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRA M / KEGIATA N / SUB KEGIATA N	TARG ET AKHIR PERIO DE RENST RA OPD	REALI SASI CAPAI AN RENJ A OPD TAHU N 2023	PRAKI RAAN CAPAI AN TARGE T RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KE LOMP OK SASAR AN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERAN GKAT DAERAH PENANGG UNG JAWAB		
							TAR GET 2025	PAGU INDIKATI F (Rp)	L OKASI	SUMBER DANA	PRIORI TAS			TAR GET	PAGU INDIKATI F (Rp)			
											NASIO NAL	DAER AH						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
		Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	3 Dokumen				1 Dokumen	0,00	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun dari Desa dan Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif Pelaksanaan Reformasi masih Birokrasi	DESA	1 Dokumen	60.001.800,00	DINAS PEMERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		
4,	2.13.05	PROGRAM PEMERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	100 persen			100 persen	1.333.999.900,00						100 persen	2.060.000.000,00			

Renja PMD 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRA M / KEGIATA N / SUB KEGIATA N	TARG ET AKHIR PERIO DE RENST RA OPD	REALI SASI CAPAI AN RENJ A OPD TAHU N 2023	PRAKI RAAN CAPAI AN TARGE T RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KE LOMP OK SASAR AN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERAN GKAT DAERAH PENANGG UNG JAWAB
							TAR GET 2025	PAGU INDIKATI F (Rp)	L OKASI	SUMBER DANA	PRIORI TAS			NASIO NAL	DAER AH	
							TAR GET	PAGU INDIKATI F (Rp)								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.13.05.2.0 1	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat	3 Paket 3 dokumen			1 Dokumen	1.333.999.900,00			Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	DESA	1 Paket 1 dokumen	2.060.000.000,00	DINAS PEMERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	2.13.05.2.0 1.0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat														

Renja PMD 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRA M / KEGIATA N / SUB KEGIATA N	TARG ET AKHIR PERIO DE RENST RA OPD	REALI SASI CAPAI AN RENJ A OPD TAHU N 2023	PRAKI RAAN CAPAI AN TARGE T RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KE LOMP OK SASAR AN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERAN GKAT DAERAH PENANGG UNG JAWAB		
							TAR GET 2025	PAGU INDIKATI F (Rp)	L OKASI	SUMBER DANA	PRIORI TAS			TAR GET	PAGU INDIKATI F (Rp)			
											NASIO NAL	DAER AH						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	386 Lemba ga			386 Lemba ga	1.273.999.600,00	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAAN YANG BIDANG PENDIDIKAN	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk membuhana Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantas an Kemiskinan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif Pelaksanaan Reformasi masih Birokrasi	DESA	386 Lemba ga	1.000.000.000,00	DINAS PEMERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			
	2.13.05.2.0 1.0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna																

Renja PMD 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIOD RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TAR GET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
							TAS	PRIORITAS			NASIONAL	DAERAH							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	3 Laporan				1 Laporan	60.000.300,00	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	DESA	1 Laporan	60.000.000,00	DINAS PEMERINTAHAN MASYARAKAT DAN DESA			
	2.13.05.2.0 1.0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga																	

Renja PMD 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRA M / KEGIATA N / SUB KEGIATA N	TARG ET AKHIR PERIO DE RENST RA OPD	REALI SASI CAPAI AN RENJ A OPD TAHU N 2023	PRAKI RAAN CAPAI AN TARGE T RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KE LOMP OK SASAR AN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERAN GKAT DAERAH PENANGG UNG JAWAB		
							TAR GET 2025	PAGU INDIKATI F (Rp)	L OKASI	SUMBER DANA	PRIORI TAS			NASIO NAL	DAER AH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga				1 Dokumen	0,00	Kab. Padang Lawas Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Inovatif Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	DESA		1.000.000.000,00	DINAS PEMERINTAHAN MASYARAKAT DAN DESA		
			J U M L A H						7.580.153.313,00						8.525.996.976,00			

Renja PMD 2025

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Guna Mewujudkan tercapainya target tujuan dan sasaran yang tertuang dalam Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Padang Lawas Utara tahun 2024- 2025 serta mendukung tercapainya Tujuan RPD Kabupaten Padang Lawas Utara 2024-2026 dan secara Khusus menyajikan Prioritas Pembangunan Pemerintah Daerah sebagaimana yang telah di dagarkan dalam tema RKPD Kabupaten Padang Lawas Utara tahun 2025.

Adapun sumber pendanaan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Padang Lawas Utara secara umum berasal dari APBD Kabupaten Padang Lawas Utara tahun 2025

Pada Tahun 2025 Pagu anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Padang Lawas Utara adalah sebesa Rp. 7.580.153.313,- terdiri dari 4(empat) Program dan 8 (Delapan) Kegiatan sebagai berikut:

TABEL 4.1
Renja Tahun 2025
Kabupaten Padang Lawas Utara

	Program/Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	6
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.126.138.813
i	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	19.185.900
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8.959.800
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10.226.100
ii	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.367.072.413
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.202.394.013
2	Penyediaan Administrasi Tugas ASN	154.560.000
3	Koordinasi dan Penyusuan Laporan Keuangan Akhir tahun SKPD	10.118.400
iii	Administrasi Umum Perangkat Daerah	357.111.900
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.067.200
2	Penyedian Peralatan dan Perlengkapan Kantor	55.196.200
3	Penyedian Peralatan Rumah Tangga	8.746.900
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	17.270.800
5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2.098.800
6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	30.930.000
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	237.802.000
iv	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	289.008.600
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.000.000
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	90.120.000
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	192.888.600
v	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	93.760.000

Renja PMD 2025

1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	81.250.000
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12.510.000
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	192.888.600
vi	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
2	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	60.000.000
i	Fasilitasi kerjasama antar Desa	
1	fasilitasi kerjasama antar desa dengan Pihak Ketiga dalam kabupaten/Kota	60.000.000
3	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	60.014.600
i	Pembinaan dan pengawasan penyelenggraan administrasi pemerintahan desa	
I	Pembinaan peningjatan kapasitas aparatur pemerintahan desa	60.014.600
2	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan kelurahan	
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN,LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	1.333.999.900
i	Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Ada Tingkat Dearaha Kabupaten/kota serta pemberdayaan Masyarakat pelakunya Hukum adat yang sama daeraah kabupaten/Kota	1.333.999.900
1	Peningkatan kapasitas kelembagaan lembaga kemasyarakatan Desa/Kelurahan(RT,RW,PKK,POSYANDU,LPM dan Karang Taruna) Lembaga adat desa/kelurahan dan masyarakat Hukum adat	
2	Fasilitasi Pemerintahan Desa dalam Pemanfaatan Tekhnologi Tepat Guna	60.000.300
3	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	0
		7.580.153.313

Renja PMD 2025

BAB V PENUTUP

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, maka dapat dirumuskan beberapa hal terkait dengan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yaitu :

1. Dalam kelancaran pelaksanaan kegiatan sangat ditentukan oleh ketersediaan anggaran yang memadai serta diupayakan dapat meningkat setiap tahun mengingat sasaran program Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sangat kompleks baik jenis maupun jumlahnya. Jika kondisi anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan program, maka dalam penyusunan program akan ditetapkan skala prioritas kegiatan yang sangat mendesak dan berkaitan dengan kepentingan masyarakat.
2. Untuk kelancaran kegiatan, dalam perumusan kegiatan selalu memperhatikan usulan kegiatan yang disampaikan oleh pemangku kepentingan melalui forum musrenbang, juga memperhatikan petunjuk-petunjuk teknis pada setiap program/kegiatan yang diterbitkan oleh pemerintah pusat maupun provinsi.
3. Rencana tindak lanjut dari pelaksanaan program/kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah :
 - Evaluasi terhadap keseluruhan program/kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan dan kendala yang dihadapi untuk program/kegiatan selanjutnya.
 - Secara berkelanjutan melaksanakan bimbingan teknis bagi staf yang melaksanakan kegiatan teknis mengingat program dan kegiatan senantiasa ada perubahan.

Demikian Rancangan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Padang Lawas Utara tahun 2025 disusun sesuai dengan Permendagri Nomor 86 tahun 2017, Permendagri Nomor 90 tahun 2019

Gunung Tua, 19-7-2024

KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA KABUPATEN PADANG
LAWAS UTARA



YUSUF MD, HASIBUAN, MAP
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)
NIP. 1977091419

Renja PMD 2025